

# ERA EKSPERIMEN POLITIK DARI PRESIDEN SUKARNO 1956-1966

Oleh : Let.Kol. Purn. Sjoelib

u

## Tirani, Reformasi dan Sejarah

Lonceng bagi berakhirnya sebuah kehidupan tirani, yang telah sempat berlanjut dengan marak selama 40 tahun di tengah bangsa yaitu, 10 tahun Rezim Nasakom dan Demokrasi Terpimpin dibawah Presiden Sukarno dan 32 tahun Rezim Militerisme dan Totaliterisme dibawah Presiden Suharto, telah berbunyi.

Dibunyikan secara awal dan bukan tanpa resiko, oleh seorang Amien Rais dengan issue-nya "Successie", dan digemakan oleh para mahasiswa dengan demonstrasi yang gagah berani tapi teratur, sopan dan tanpa kekerasan demi kesentosaan bangsa.

Maka berakhirilah pula semenjak tanggal 21 Mei itu, segala pencekalan manusia atas manusia (*de l'homme par l'homme*) dan tamatlah pula suatu suasana yang selama ini menindih dan menekan kehidupan umat.

Lonceng itu juga telah ikut membangunkan kebenaran-kebenaran yang tertidur, atau ditidurkan oleh kekuasaan dan tak dapat dibangunkan di waktu itu, khusus di bidang Sejarah Negara dan Bangsa.

Berhubung sejarah itu akan menjadi guru bagi generasi yang akan datang, dengan antaranya untuk menayangkan rambu-rambu yang akan bermanfaat bagi generasi kita, sewajarnya sejarah itu diupayakan untuk dibenahi kembali dengan baik. Menampilkan suatu sejarah yang lurus itu memang seakan sama dengan membangun sebuah "jalan highway bebas hambatan" akan terdapat gedung indah yang agak tergeser atau kebun bunga yang terawat baik, yang agak terpotong. Menyusun sejarah yang benar memang sering akan menimbulkan kepedihan di sana sini, karena tersayat pisau kebenaran. Dan bagi bangsa yang maju, sering pula itu disusul dengan berbagai cara pernyataan excuse. Pada 10 Mei dua

tahun yang lalu misalnya, kanselir Jerman Helmut Kohl langsung terbang ke Rotterdam, kota besar dagang di negeri Belanda, hanya untuk mohon maaf atas pemboman liar, yang pernah mendaratkan kota tersebut pada 10 Mei tahun 1940, oleh pesawat-pesawat Nazi. Bangsa kita, atau tokoh-tokoh kita yang pernah berada disekitar puncak kekuasaan dalam perjalanan sejarah bernegara, mungkin saja belum mengenal budaya yang demikian.

Orang sekarang misalnya akan bertanya lagi mengenal hal-hal yang sebenarnya sekitar PRRI, untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih terang, tidak samar-samar ataupun dualistis. Tidak hanya terus menerus saja jawaban tunggal dari seorang Nasution atau seorang Suharto melulu.

Kehormatan atau martabat sejumlah pemimpin nasional, seperti Moh. Natsir, Mr. Assa'at, Syarifudin Prawiranegara, Burhanudin Harahap dan lain-lain serta jasa para bekas pejuang kemerdekaan yang cukup konsekwen di masa lalu seperti Kol. Zulkifli Lubis, Letkol. Ventje Sumual, Letkol. Ahmad Husein, Kol. Dahlan Djambek, Kol. M. Simbolon, Kol. Kaliwarang dan lain-lain, terlalu berarti bagi sejarah, untuk begitu saja dicontongkan oleh ulah dari pihak yang berkuasa pada saat yang berlalu.

Seterusnya demi pembenahan sejarah itu perlu juga ditampilkan lagi, beberapa contoh pertanyaan yang selama ini, sering dijawab dengan dugaan-dugaan saja, misalnya :

- Kenapa Kol. Z.Lubis menantang Kasad Nasution dan menjadi buronan?
- Berhasilkah Kasad Nasution dalam tujuannya, sesudah ia menang dalam memerangi Ahmad Husein dan Ventje Sumual, yang telah gigih menentang komunis itu? Apakah perang PRRI tidak hanya suatu kekeliruan, seperti yang pernah juga dikemukakan oleh Menhan Mc. Namara mengenai perang mereka di Vietnam?
- Kenapa Syafrudin, Natsir, Assa'at dan Baharuddin Harahap, yang diantaranya adalah mantan setaraf Presiden RI dan yang cukup berintegritas tinggi itu asset bangsa lagi, dicekal begitu saja selama bertahun-tahun, bahkan sampai dibiarkan se"kandang" dengan tahanan G30S?
- Kenapa pemimpin nasional seperti St. Syahrir sempat dibiarkan meninggal dalam status tahanan?
- Kenapa gerangan pihak Amerika, di tengah peperangan

melawan pasukan Nasution yang telah mendarat di Sumatera dan Sulawesi Utara itu, tiba-tiba meninggalkan Husein dan Ventje, dan justru berpihak membantu Nasution, yang kenyataannya berposisi pada jajaran komunis?

- Kendati sama sejajaran, kenapa Nasution hendak dibunuh oleh Letkol Untung perwiranya sendiri dalam menghadapi PRRI?

- Kenapa dua anggota marinier bisa begitu saja digantung di Singapore diluar Kompensi Jenewa; siapa yang bertanggungjawab?

- Kenapa Amnesti/Abolisi dan Rehabilitasi yang dijanjikan Sukarno dan Nasution terhadap PRRI yang dikalahkan, tidak dipenuhi alias didustakan?

Di antara para pelaku sejarah tersebut, khusus di bidang peristiwa PRRI satu dua masih ada yang hidup, termasuk Nasution sendiri, Ahmad Husein, Ventje Sumual, Kawilarang, Simbolon dan Suharto, bekas Panglima dari Divisie Diponegoro yang bertugas menumpas para pemberontak, di Sumatera Barat selama bertahun, dengan segala akibatnya yang sangat pedih itu.

Sang reformasi hendaknya juga segera mengangkat kebenaran-kebenaran sejarah untuk dipersembahkan kepada generasi yang akan datang. Seminar ini bagi saya, untuk mencoba menyoroti sesuatu periode dalam 53 tahun umur Republik Indonesia, yang saya namakan :

#### **Periode Eksperimen Politik dari Presiden Sukarno (1956-1966)**

Karena dalam era atau periode itu terdapat sebuah Peristiwa PRRI yang sempat menonjol itu. Dalam periode tersebut, Jend.A.H.Nasution, yang telah diangkat oleh Sukarno untuk kedua kalinya sebagai Kasad, sesudah selama 3 tahun dischors ulah peristiwa 17 Oktober 1952, telah membawa keterlibatan AD ke dalam realisasi Nasakom dan yang paling dragmatis, dalam periode itu, ia telah atau ikut menyatakan 3 jenis peperangan seperti :

- Perang PRRI sendiri
- Perang Trikora dan
- Perang Dwikora

Yang paling traumatis, yang paling banyak memakan korban berupa nyawa dan harta serta membawa naween (war-aftermath) yang demikian panjang, adalah Perang PRRI, yang berlangsung selama 3 tahun

lebih itu. Nasution si pemegang alat picu senjata, telah terlalu cepat menembak bahkan sedikit seperti berdarah dingin serta sangat personal.

Dalam periode pedih selama sepuluh tahun itu, sebenarnya dapat juga disebutkan, bahwa terdapat empat orang pemeran utama, yaitu : Sukarno, Nasution, Ahmad Husein dan Ventje Sumual. Namun jika harus ditunjuk lagi, siapa gerangan pemeran puncak, ia itu tidak lain adalah Jend. Nasution sendiri. Kolonel Z. Lubis, perwira sederhana, tapi berpandangan tajam dan luas, jauh-jauh dalam tahun 1956, tahun di mana Hatta turun meninggalkan Sukarno, sudah mensinyalir akan mungkin adanya bencana bagi negara. Ia jadi buronan I disusul langsung kemudian oleh pergolakan daerah yang gilih.

Dasawarsa 1956-1966, saya sebutkan : Dasawarsa atau Periode Eksperimen Politik Presiden Sukarno. Sebagai sedikit intermezzo, saya akan simboliskan eksperimen dimaksud secara begini : Apotikernya adalah Presiden Sukarno, laboratoriumnya adalah Republik Indonesia yang tercinta, laborannya adalah Kasad Jend. Nasution, unsur yang akan dites adalah Nasakom dan Demokrasi Terpimpin, dan mediumnya, kelinci percobaannya, ya Tuhan, adalah bangsa Indonesia sendiri Ahmad Husein dan Ventje Sumual (Lubis dari semula) menggendor dengan gilih dari luar, supaya percobaan dihentikan.

Eksperimen ini dimulai dari berhentinya Wapres Hatta tahun 1956 dan berakhir di malam G30S tahun 1965 atau di saat Supersemar melarang PKI tahun 1966. Apotik yang terbakar dipadamkan, sayangnya si "pemadaman kebakarannya" sendiri (Suharto) setelah selesai memadamkan, tetap saja bercokol di tempat tersebut seterusnya sampai selama 32 tahun. Mudah-mudahan sketsa melintas ini dapat juga memberikan pengertian tentang situasi bagi kita orang awam.

### **TNI Angkatan Darat dan Eksperimen Politik Sukarno**

Sejarah Republik Indonesia, ternyata banyak didominir oleh sejarah TNI-AD, terutama semenjak munculnya peristiwa 17 Oktober tahun 1952 sampai kepada puncak militerisme dan totaliterisme dibawah Jendral Soeharto tahun 1998 ini. Benang merahnya adalah suatu perjalanan kehidupan militer, yaitu sejarah dari tingkah pribadi sejumlah tokoh-tokoh di dalamnya. Baru saja 2 tahun sesudah pengakuan kedaulatan telah timbul suatu konflik yang serius dalam pimpinan AD.

Kasad Kolonel Nasution bertikai berat dengan wakilnya Kol. Bambang Supeno dan Kolonel Zulkifli Lubis mengenai kebijakan dalam pimpinan AD. Kehebohan sampai kedalam parlemen. Nasution mengemukakan orang-orangnya mengadakan demonstrasi, untuk menuntut dibubarkannya parlemen yang dianggap terlalu mencampuri persoalan militer dan meminta Presiden Sukarno untuk mengambil oper saja semua kekuasaan. "saya tak mau menjadi diktator", kata Sukarno. Nasution kemudian diskors, ia digantikan oleh Kol. Bambang Sugeng.

Pada awal tahun 1955, tahun yang sarat lagi dengan masalah-masalah, di Yogya diadakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh para Komandan Resimen keatas untuk menunjukkan kedua pihak yang terpecah, yang diakibatkan oleh kejadian 17 Oktober 1952 itu. Diadakan pula suatu rapat kolegial waktu itu, disamping rapat formil, dimana pangkat dan jabatan sementara dikesampingkan, untuk secara terbuka membahas masalah dan mencari rumus-rumus guna keutuhan Angkatan Darat. Lahirlah apa yang dinamakan Piagam Jogja. Nasution datang dengan berpakaian sipil dan Presiden Sukarno juga turut hadir pada penutupannya.

Pada bulan Juni, kemudian, tiba-tiba Presiden Sukarno melantik Kol. Bambang Utoyo sebagai Kasad baru. Wakil Kasad Kol. Lubis waktu itu, bersama semua Panglima Territorium serentak memboikot keputusan Panglima Tertinggi itu.

Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo meminta Lubis untuk toh dapat menerima Kasad Bambang Utoyo selama beberapa waktu saja di M.B.A.D. Sesudah AD menjawab dengan "tidak", maka malamnya Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo terpaksa menyerahkan mandatnya di Parlemen. Ibukota Jakarta saat itu terasa tegang dan sepi; tentara berkonfrontasi dengan politisi dan Sukarno.

Kol. Lubis membentuk dengan cepat sebuah team Asistensi, yang diketuai oleh Let.Kol Mokoginta yang bertugas untuk memberikan pemimpin AD, pandangan serta saran, termasuk terutama di bidang sosial dan politik, guna menangani krisis yang timbul.

Semua tokoh-tokoh partai berdiam diri, menunggu apalagi langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan AD dibawah Kolonel. Lubis. Terdapat bisikan-bisikan bahwa diantara mereka ada yang tak keberatan bila AD mengambil oper saja pemerintahan. Tapi pernah Mokoginta dalam suatu rapat militer menegur seorang perwira. Janganlah coba

mengucapkan disini kata-kata "Junta".

Pada akhirnya Team Asistensi sampai kepada satu kesimpulan yang cukup indah, yaitu : AD tidak pernah bermaksud untuk mengambil oper pemerintah; AD hanya ingin adanya garansi, bahwa negara akan diperintah dengan baik!

Kemudian Burhanuddin harahap ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru, dengan tugas utama melaksanakan pemilu dan Presiden Sukarno berangkat ke Tanah Suci.

Wakil Presiden Hatta pernah menolak pengembalian Irian Barat melalui peperangan. Ia pernah mensitir ucapan Menteri Keuangan Belanda; *Ik heb geen enkel gulden over voor West Nieuw Guinea* (Saya tak punya satu rupiahpun untuk Irian Barat).

Tahun 1955 diakhiri dengan hasil pemilu yang mengejutkan. PKI, partai yang pernah menikam Republik dari belakang sewaktu perjuangan melawan Belanda tahun 1948, ternyata termasuk Empat Besar, di samping PNI, Masyumi dan NU.

Dari perawatannya ke negara-negara sosialis, Sukarno banyak mendapat bahan-bahan baru untuk menyusun ide-ide baru pula. Ia pun sangat antusias dengan Fidel Castro. Dan kebetulan, hasil pemilu menambah mendekati sasaran-sasaran dari pemikirannya.

Ia melihat unsur nasionalisme, unsur agama dan unsur komunisme dapat digodok untuk merupakan suatu konsep baru guna membawa negara dan bangsa Indonesia ini kepada kesentosaan dan kesejahteraan. Dan karena rakyatnya belum cukup mampu, demokrasi yang diberikan harus dipimpin.

Kasad Nasution, yang seperti lontaran Jenderal Simatupang : "Sudah gagal, kok diangkat lagi", bersedia menjadi orangnya Sukarno, tak menjadi soal bagaimana dan untuk berapa lama. Dalam pada itu ia, dalam kantong mungkin saja menyimpan satu konsep pula (isi surat Moh. Natsir).

Hanya saja, pada awal tahun 1956 Wakil Presiden Hatta memajukan permohonan berhenti ketika diminta agar ia membatalkan niatnya itu, ia menolak. Sewaktu diusulkan lagi agar ia memberitahukan alasan pengunduran dirinya itu, kepada masyarakat, ia mengatakan : "Itu yang paling tidak mungkin, nanti bangsa akan terpecah-pecah".

Walaupun Presiden Sukarno gagal mengangkat Kol. Bambang Utoyo yang liat itu, sebagai Kasad untuk menggantikan Bambang

Sugeng, karena ditolak kuat oleh seluruh jajaran AD di bawah Kol. Lubis, Sukarno kebalikannya berhasil mengurungkan penggantian Kasau Suryadarma melalui sebuah insiden Sersan Kalebos, dan dengan itu membatalkan penempatan PM/Menhan Burhanuddin Harahap. Ia seterusnya tetap mencari-cari seorang Kasad baru, yang akan dapat ditugaskan atau diikutsertakan, disamping memimpin AD untuk terlaksananya ide-ide politik baru yang sedang ia kembangkan, termasuk juga rencana penyerangan Irian Barat, sebagai susulan pembatalan perjanjian KBM dengan Belanda.

Di luar dugaan, pilihan Sukarno jatuh kepada Mayjen A.H. Nasution, yang justru telah selama 3 tahun dalam status non-aktif dan di waktu mana ia telah bergiat melangkah ke bidang politik, berikud mendirikan IPKI, dengan tujuan untuk dapat ikut pemilu pada akhir tahun 1995 nantinya.

Bahkan, Nasution yang ditunjuk itu, selanjutnya kelak mendapat tambahan pangkat serta jabatan seperti : Kasab, Menko Hankam, Koti Bidang Militer dan Wapangsar. Namun ia kemudiannya juga mendapat mitra militer baru pula, karena Subandrio, Dr. Leimena dan Chairul Saleh, masing-masing diangkat oleh Sukarno menjadi Marskal Udara, Laksamana Laut dan Jenderal Angkatan Darat.

Sukarno dan Nasution sama-sama gemar dengan UUD 1945, karena konstitusi ini tampaknya memberikan banyak kekuasaan kepada Badan eksekutif. Dan Sukarno memang tidak ingin hanya sebagai Kepala Negara atau sesepuh bangsa saja; ia sebagai pribadi yang berbakat progressief/aktif ingin pula langsung melaksanakan pemerintahan. Apalagi, demi ide barunya untuk mencrapkan perkawinan dari tiga unsur : kebangsaan, agama dan komunisme dan bersamaan dengan itu menjalankan prinsip demokrasi terpimpin, sekalian memperbaiki demokrasi Barat yang hanya punya rumus  $f + 1$  sama dengan benar itu. Semua itu telah digodoknya dalam apa yang disebutnya "Konsepsi Presiden". Kendala yang masih ada, ialah berupa partai-partai tertentu terutama Masyumi dan tokoh-tokoh tertentu, serta *last but not the least*, yaitu Konstituante hasil pemilu yang saat itu lagi rapat-rapat di Bandung.

Menurut Sukarno dan Nasution, dengan sedikit gerakan-gerakan yang disiapkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertele-tele itu, dapat saja disuruh pulang dengan menggunakan kekuasaan SOB dan dekrit. Sesudah itu akan licinlah jalan untuk *take off* guna mengrealisasi

demokrasi terpimpin. Dan AD akan berdiri dibelakang semua itu, seraya akan mendapat jatah dalam eksekutif, bahkan legislatif.

Kendati demikian; masih ada juga yang akan menghambat, yaitu, tuntutan-tuntutan dan sikap menantang lainnya dari komandan-komandan militer di daerah, yang berada di luar pulau Jawa. Selama tantangan masih terdapat di Jawa, berarti masih bisa diatur. Seperti pembangkangan sejumlah perwira senior Siliwangi dan sejumlah abiturien dari S.S.K.A.D; mereka secara gampang dapat dicekal dan dinon-aktifkan. Termasuk nantinya sejumlah pemimpin-pemimpin masyarakat dengan tokoh-tokoh nasional yang memang ada memiliki keberanian mental untuk menolak rencana ambisius Sukarno. Semua mereka yang menentang pemerintah Nasakom atau Orla, baik militer maupun sipil atau dari masyarakat umum, sampai ke akhir hayat mereka, harus hidup jauh dari sejahtera dan senantiasa diliputi ketakutan. Dan kondisi demikian tak pernah menjadi baik, kendati bersambung dengan Orba.

Sementara itu, Wakasad Kol. Lubis, seorang prajurit yang jujur, sangat rendah hati, tapi selalu berpandangan tajam, mengikuti dan menyadari sekali apa yang sedang terjadi dan apa yang mungkin bakal terjadi, khususnya dengan AD di bulan-bulan akhir tahun 1956. Ia melihat kesibukan Kasad Nasution dengan tokoh progressief seperti Adam Malik, Achmadi, Hanafie dan Moh. Yamin; Chairul Saleh bahkan dipanggil pulang dari tempat eksterminernya di Negeri Belanda.

Kemudian beberapa panglima territorium dimutasikan, Kol. Kaliwarang serta Kol. Warow masing-masing ditunjuk sebagai atase militer di Washington dan Peking. Wakasad Lubis sendiri dipindahkan ke Medan, yang lebih banyak dimaksud untuk menjauhkannya dari Jakarta. Ia menolak, ia meninggalkan M.B.A.D dan menghilang. Pemerintah mengeluarkan perintah penangkapan dan berbulan-bulan lamanya ia menjadi buronan di Ibukota, sebelum ia menyingkir ke Sumatera, seperti yang dilakukan oleh perwira-perwira lainnya dan tokoh-tokoh politik yang sedang diincer dan dicekal di mana-mana.

Mungkin saja, hal ini sudah menjadi kebetulan; figur Kolonel Lubis sudah tiga kali muncul dalam setiap krisis dalam pimpinan AD. Dan dalam setiap kalinya, justru selalu pula ditemui keterlibatan tangan Presiden Sukarno; ia dan Sukarno yang sebagai orang nomor satu tidak berupaya berada di atas masalah, ia bahkan selalu gemar berada di dalam dan di tengah masalah itu sendiri.

Pertama : peristiwa 17 Oktober 1952, dimana Lubis mendampingi Kol. Bambang Supeno dalam menentang Nasution mengenai kebijakannya dalam pimpinan AD. Kedua : peristiwa Kol. Bambang Utoyo (27 Juni 1955), dimana ia sampai menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali Sastroamijoyo. Ketiga, ialah kali ini : pengangkatan kembali Nasution sebagai Kasad, yang akan mengandung komplikasi yang luas lagi, yang ia tantang sama sekali.

Pada suatu kali, ditengah kondisi ketegangan di Jakarta, apalagi sesudah percobaan yang abortief dari pasukan RPKAD dibawah komando Mayor Djaelani dalam pelaksanaan suatu rencana penculikan terhadap Jendral Nasution dan Presiden Sukarno, Kol. S. Parman dari Markas Staf Angkatan Perang secara berbisik mengajak Letkol. Sutoyo (bukan Suyoto) dan saya, untuk diam-diam menemui Kol. Lubis disuatu tempat berjumpa yang akan ditentukan. Kol. S. Parman adalah ketua pengurus pusat dari Ikatan Perwira dan ingin mencoba mendapatkan jalan kerukunan antara Lubis dengan Nasution, walaupun akan sedikit berisiko, dengan caranya sendiri.

Dengan bertukar kendaraan sampai tiga kali dalam perjalanan bermisise itu, kami tiba di sebuah gedung di Jl. Sudirman sekarang yang waktu itu masih belum diaspal. Saya tercengang melihat beberapa perwira disekitar Lubis, yang saya ketahui bertugas di Mabad pada siang hari.

Kesimpulan dari pertemuan diam-diam itu adalah, Kol. Lubis secara etik keperwiraan, bersedia untuk menyerahkan diri guna diadili, bila pimpinan AD yang sekarang, demi keutuhan militer selanjutnya, diganti. Menurut pengamatannya, Nasution sedang membawa tentara terlalu jauh kedalam pelaksanaan program politik Presiden Sukarno yang akan banyak menimbulkan kerumitan-kerumitan.

Esoknya kami bertiga dengan tiba-tiba diinterogasi atas perintah Menteri Pertahanan oleh suatu team diketuai Kol. A.Yani, termasuk didalamnya Kol. Dahlan Djambek dan Kol. Kretarto. Kami dianggap telah berhubungan secara illegal dengan seorang perwira yang sedang dikejar untuk ditangkap. Pertemuan malam itu rupanya dibocorkan oleh seorang kapten dalam rombongan Lubis; ia seorang simpatisan komunis.

### Reuni Ex-divisi Banteng

Dapat juga dikatakan, apa yang dinamakan di waktu yang lewat

Pemberontakan PRRI pada dasarnya dipicu di Sumatera Barat. Pada bulan November 1956, berkumpul di Padang sekitar 600 pejuang Ex-Divisi Banteng yang berdatangan dari seluruh pelosok tanah air, tempat mereka merantau atau bertugas.

Di waktu peperangan melawan Belanda, mereka itu berjuang di bumi Minangkabau, Riau dan Jambi, saat itu disebut Sumatera Tengah; tetapi sesudah penyerahan kedaulatan, mereka berpencar, baik untuk bertugas sebagai sipil atau militer, maupun sebagai orang partikular atau meneruskan sekolah.

Banyak sekali yang telah meninggalkan jabatan ketentaraan karena menurut mereka, menjadi tentara itu hanya bila timbul perang saja. Itu pulalah yang menyebabkan lancarnya pelaksanaan demobilisasi di Sumatera Tengah. Pada saat para pejuang lagi bergairah memasuki kota, Kasad Kol. A.H.Nasution menglikwidir Divisi IX Banteng satu-satunya Divisi yang diperlakukan demikian. Dari 5 bahkan 6 Resimen hanya tinggal 1 Brigade yang terdiri dari 5 Batalyon dan itupun harus diorganikan ke Tentara dan Teritorium I Bukit Barisan, karena statusnya sebagai komando utama dihapuskan. Kendati perlakuan ini ditantang dengan mengirimkan beberapa perwira menghadap Kol.A.H.Nasution di MBAD di Jakarta, perubahan itu tak dapat dirubah lagi. "Saatnya sekarang tuan-tuan harus menjadi tentara yang sebenarnya, tuan-tuan di Sumatera Tengah harus melapor dari sekarang ke Medan, bukan lagi kesini", katanya, dan ia sendiri pada waktu itu memang kelihatan seperti orang militer tulen yang tak sudi bicara banyak.

Suasana pada awal masuk kota memang lain, dan untungnya orang Minangkabau tak begitu suka hidup sebagai serdadu. Pemerintah Hindia Belanda sangat memahami itu dan karena itu pula, tak pernah mau menerima orang Padang sebagai prajurit diwaktu sebelum perang.

Semenjak berakhir perang Imam Bonjol, baru pada waktu Revolusi tahun 1945-lah, mereka kembali memanggul senapan, itupun sesudah mendapat latihan dan ilmu militer dari tentara pendudukan Jepang.

Kesekian ratus veteran, pejabat sipil, polisi dan militer yang hadir berdialog sambil bernostalgia di Ibukota Sumbar itu, masih menganggap diri mereka Republikein-Republikein sejati, pendiri-pendiri Republik yang berjasa dan konsekwen, kebalikannya dari apa yang disebut golongan federalis (istilah yang menerima berpihak kepada Belanda).

Mereka sangat bangga atas jasa dan saham dari daerah Sumatera

Barat dalam perjuangan kemerdekaan melawan Belanda, terutama atas dua hal yang tak dapat diperlihatkan oleh daerah-daerah lain; di daerah ini terbentuk pernah PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) untuk mengisi kevakuman pemerintahan Pusat di Jogja, sebagai salah satu syarat bernegara. Mereka malah menyesalkan tentara di Jawa yang tak mampu mengamankan dan mengevakuasi pemerintah Pusat yang ada waktu itu, selagi tentara Belanda bergerak dari Maguwo menuju Jogja untuk mencari menawan Soekarno dan Hatta. Hal lain yang patut sekali dicatat sejarah adalah, kemampuan masyarakat Minang untuk menolak dengan tegas dan mutlak, usaha gigit Belanda dibawah bekas Residen Van Straten dalam Clash ke II untuk mendirikan suatu Negara Bagian, dalam kerangka Negara Federal, yang tidaklah demikian halnya dengan Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan di seluruh Jawa.

Karena itu pula, etnik Minang agak terluka, sewaktu moncong senjata dihadapkan ke daerah ini oleh Pimpinan AD sendiri, pada awal tahun 1958 (40 tahun yang lalu), melalui suatu serangan umum dengan nama ironis pula "Operasi 17 Agustus" kendati bagaimanapun juga alasannya.

Sesudah Sumatera Barat dikalahkan dengan perang selama + 3 fi tahun, yang oleh Nasution ditugaskan kepada pasukan Diponegoro yang kebetulan pula sangat terinfiltrasi komunis, dibawah panglimanya pada waktu itu Kol. Suharto, maka bak kata Gubernur Harun Zein "Orang Padang kehilangan harga diri". Orang Padang bersembunyi-sembunyi mengatakan dirinya siapa, dan banyak ujung nama ditukar atau ditambah dengan "O", misalnya nama Matias menjadi Matioso.

Kembali kepada kelebihan-kelebihan Sumatera Barat pada masa Revolusi tadi, maka dapat dipahami bahwa suasana dalam pertemuan Reuni itu, agak "bernada tinggi" karena menganggap masih mempunyai "zeggenschap" yang kuat, untuk memajukan tuntutan-tuntutan dan koreksi-koreksi yang keras terhadap Pemerintah Pusat.

Begitu Republikein-nya suasana sidang waktu itu, hingga kepada beberapa anggota, sampai diminta dengan hormat untuk meninggalkan ruangan. Karena diwaktu perjuangan dianggap berada dalam kota, atau pernah bersikap federal, jadi tidak murni Republikein.

Seluruh persoalan di Pusat di perkatakan; kasus Lubis, sikap menantang alumni S.S.K.A.D, penahanan perwira-perwira senior Siliwangi, R.P.K.A.D di Keranji dan ....permohonan berhenti wakil

## Presiden-Hatta.

Dari sekian banyak makalah, pidato spontan dan komentar yang menggigit, yang antaranya disampaikan dengan rasa gusar dan kurang puas, lahirlah sebuah keputusan yang agak berani, antaranya berbunyi : "...perbaiki-perbaiki dalam pimpinan AD dan seterusnya dalam pimpinan Negara".

Mereka menginginkan adanya sanksi, sekiranya tuntutan tak memperoleh perhatian pusat. Untuk itu pula harus dibentuk sebuah badan khusus yang akan berkewajiban melaksanakan semua keputusan, diketuai sendiri oleh Let.Kol.Ahmad Husein, Komandan K.M.D.S.T (Komando daerah Militer Sumatera Tengah). Maka lahirlah Dewan Banteng yang beranggotakan 17 orang itu. Badan inilah yang sebulan kemudian mengambil over kekuasaan Gubernur Sumatera Tengah Ruslam Mulyoharjo, karena tuntutan-tuntutan ternyata kurang mendapat tanggapan. Pusat tersentak, dari awallah sebuah drama nasional. Yang lebih banyak disebabkan oleh cara dan bentuk penyelesaiannya dari pihak Pusat.

Beberapa hari kemudian muncul Dewan Gajah di Medan dibawah pimpinan Panglima Kol. Simbolon, yang hanya berumur beberapa hari, karena sesuatu rekayasa dari pihak Nasution. Selagi berunding Kepala Staf Territorium Let.Kol. Jamin Ginting diumpun untuk ambil over kepanglimaannya dan terjadilah konflik fisik. Umpan juga diberikan kepada Komandan Resimen II di Siantar Let.Kol. Wahab Makmur. Usaha Perwira Intel Kasad menjadi sempurna, dua orang meng-claim kedudukan kepanglimaannya dan Kol. Simbolon diburu sampai ke Sumbang.

Timbul pada Dewan Garuda di Palembang dibawah Let.Kol. Berlian; dua bulan kemudian, yaitu awal Maret 1957 dari Indonesia Timur meledak pula suara resolusi yang cukup menggoncang dari Permesta, dibawah pimpinan Let.Kol.Ventje Sumual, lulusan S.S.K.A.D semasa masih dibawah Supervisie Militer Misi Belanda.

Banyak macam penyelesaian yang telah ditempuh Pemerintah Pusat, seperti pengiriman misi-misi, pembentukan panitia-panitia; Munas (Musyawarah Nasional), Munap (Musyawarah Pembangunan) dan lain-lain.

Selama setahun lebih, masih tak kunjung ditemui jalan keluar yang dikehendaki. Tuntutan makin diperjelas, makin dikompakkan, seperti pada pertemuan Palembang dan terakhirnya di Sungai Dareh.

Lama kelamaan para perwira di daerah-daerah mulai merasakan bahwa tak ada maksud Pusat untuk memenuhi tuntutan yang diutarakan. Seperti kata pepatah, ibarat makan buah simalakana, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Dan dalam hal ini, keduanya si ibu dan si bapak tak mau mati, Sukarno dan Nasution tak beranjak.

Ahmad Husein salah seorang dari pejuang-pejuang Republik itu, mulai membangkang, mulai mendurhaka. Menurut norma militer yang sebenarnya, ia sudah lewat dari sekedar insubordinasi, bahkan sudah memasuki sikap inkonstitusional. Ahmad Husein menggertak dan mengancam Pusat dengan ultimatum PRRI. Entah bagaimana, harga yang ditawarkan Ahmad Husein tidak pula terlalu mahal; PRRI boleh ditukar dengan Pemerintah Sultan Jogja atau Hatta dan selesailah jual beli tinggi itu.

A.H. Nasution seorang prajurit yang memang profesional, tapi banyak pula bergiat dengan urusan non militer, sangat percaya diri, tidak melihat jalan lain. Ia berbeda sekali dengan sikap Hatta; Hatta memang kesal dan geram atas proklamasi yang dilakukan Ahmad Husein, namun ia mohon kepada Jendral Nasution supaya jangan mengerahkan alat-alat perang. Itu bukan jalan keluar. Namun Nasution tidak mau ditawar, apalagi Hatta sudah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden lagi.

Setelah 3 (tiga) tahun lebih dihajar dan dikejar, Ahmad Husein menyerah disusul oleh tokoh-tokoh nasional yang ikut menyingkir ke Sumatera dan bergabung dengan Dewan Banteng. Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi ternyata hanya siasat Sukarno dan Nasution. *The Winner takes all*. Mereka ditahan selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan pernah sampai "sekandang" dengan tahanan G.30.S.

Perjuangan PRRI dalam menantang komunisme baru terlaksana pada tahun 1966 sewaktu PKI melalui Supersemar dinyatakan terlarang. Nasution melaksanakan "Konsepsi Presiden" yang berisikan Nasakom dan Demokrasi Terpimpin, tampaknya dengan keyakinan, soal komunisme diurus nanti pada waktunya. Ia sependirian dengan Sukarno, yaitu jangan *komunistophobie*. Ia konon pernah berkata kepada perwira-perwira stafnya; anak kucing jangan dianggap dulu sebagai anak harimau. Tapi pada malam G.30.S, anak kucing itu ternyata memang telah menjadi harimau dewasa.

Bombardemen dari laut dan udara terdengar gemuruh dan menggegerkan diatas kota Padang. Gedung-gedung bergoncangan dan kepingin-kepingin beterbangan. Orang-orang berlarian dengan pontang-panting kesana-kemari, tanpa tujuan, selain dari hanya mengikuti naluri untuk dapat tetap hidup. Perempuan-perempuan dengan bibir pucat, meratap sambil duduk terpaksa dan anak-anak berteriak-teriak tiada menentu di tengah suasana yang riuh dan gegap gempita waktu itu.

Jendral Nasution lagi bersiap-siap untuk mendaratkan tentaranya, dipimpin oleh Kol. Ahmad Yani di pantai sebelah utara kota Padang. Kendati masih dalam kondisi yang gawat seperti itu, masih ada juga satu dua orang Padang yang cukup vokal, yang tetap bisa membuka mulutnya untuk berkata : "Dahulu Jepang yang membom. Sudah itu Belanda, kini Sukarno lagi, dengan tentara Jawanya, anjing dia !".

Tetapi ada yang lain yang bertutur lebih terarah lagi : "Ahmad Husein dan Ventje Sumual bodoh. Justru memainkan kartu PKI "namanya, dengan mengundang perang begini". Ucapan yang demikian ditingkah oleh seorang intelektual yang lain : "Komunis yang cerdas justru telah meminjam tangan Nasution, untuk menghancurkan daerah-daerah yang menolak komunis!".

Maka penduduk Padang mulai pula lagi mengungsi untuk kedua kalinya semenjak perang melawan Belanda. Berduyun-duyun mereka memadati jalan raya dengan apa saja yang bisa diangkut, menuju ke daerah pegunungan di sekitar daerah Solok dan daerah Padang Panjang.

Pasukan Ahmad Husein yang tak cukup banyak itu, tidak memperlihatkan perlawanan yang berarti. Mereka kemudian lari, bersembunyi dan ada yang menyerah. Pasukan-pasukan yang terdiri dari para mahasiswa dan pelajar, walaupun sempat menunjukkan keberanian yang patut dibanggakan, tapi belum lagi mempunyai cukup pengalaman untuk bertempur lama. Mereka dipersenjatai dengan bantuan dari luar, melalui "air-dropping" dan "sea-delivery" beberapa waktu yang sebelum pendaratan.

Akan tetapi justru, sewaktu telah mulai lagi dilaksanakan usaha konsolidasi beserta latihan dan usaha pembentukan kader, termasuk rekrutmen baru, tiba-tiba pengiriman suply Amunisi dihentikan oleh pihak Amerika Serikat (*klandestein*). John Foster Dulles dengan adiknya

Alan Dulles dari CIA, menurut estimate terakhir mereka, lebih mengandalkan kekuatan Kasad Jendral Nasution sendiri yang memang juga positif anti-komunis dan yang akan lebih potensial, ketimbang Ahmad Husein dan Kasad PRRI Ventje Sumual dalam membendung dan memukul komunis. Untuk sementara Nasution memang dianggap seakan dengan sadar mengikuti dan melaksanakan konsep Sukarno yang membawa komunisme ke dalam pemerintahan, tapi pada waktunya nanti, Nasakom itu akan mendapat giliran untuk dirangani pula, sesuai siasat. Menurut pengkajian Amerika, mungkin Nasution pada saat yang tepat akan mampu dengan ADnya menepak komunis, bahkan bisa jadi jika perlu menepak Sukarno sendiri, jika mengganggu. Tapi semua kita tahu dan melihat sendiri, bahwa bagaimanapun, akhirnya Nasution ternyata kalah cepat dan kebobolan pada malam yang tragis itu, yaitu malam G.30.S.PKI.

Memang, politik luar negeri *Uncle Sam* adakalanya ada yang aneh dan itu sering ditemukan di waktu yang lewat. Sebagai umpama, di waktu Chiang Kai Sek terdesak oleh Mao Tse Tung sampai ke daerah pantai, ia ditinggalkan. Tetapi sesudah berhasil bertahan kembali di pulau Taiwan, ia hadir lagi untuk membantu menghadapi Mao. Ketika *Supreme Comander* dari *Expeditionaire Force*, Jendral Dwight Eisenhower cukup kuat untuk maju beroperasi sampai ke Berlin, ia dibatasi hanya cukup sampai ke sungai Elbe saja. Berlin biar diserahkan penuh kepada Rusia. Sesudah perang, Berlin malah melahirkan setumpuk masalah politik bagi Barat. Sewaktu Mc. Arthur berkesempatan untuk menghancurkan tuntas sentra kekuatan komunis yang disinyalir berlokasi di Utara Sungai Yalu, ia kontan ditarik pulang oleh Truman. Dan ketika Bagdad sudah dalam kondisi siap untuk diduduki oleh Norman Schwarzkopf, pihak Amerika secara strategis dan politis tidak melakukannya; sampai saat ini, Saddam Husein tetap menjadi pangkal kerepotan bagi PBB.

Tapi, PRRI menyerah kalah, bukan saja karena tak mengalirnya bantuan asing lagi, tapi terutama sekali adalah karena ditawarkan oleh Sukarno dan Nasution pemberian *amnestie*, abolisi serta rehabilitasi, yang belakangan terbukti tak pernah dipenuhi.

Bisakah apa yang dinamakan peperangan PPRI itu, tidak perlu terjadi? Atau, mungkinkah kiranya pengambilan keputusan untuk melaksanakan operasi militer dengan mengerahkan penuh kekuatan darat, laut dan udara oleh Nasution terhadap sasaran Sumatera Tengah dan Sulawesi

Selatan itu, yang telah memporak-porandakan kedua daerah itu beserta penduduknya secara lahir dan batin, bisa tidak mesti dijalankan?.

Alasan untuk menghukum dengan tindakan kekerasan, memang tersedia dan sangat nyata; ultimatum Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan perjuangan yang dibacakan oleh Kol. Simbolon tanggal 10 Februari 1958 dan Proklamasi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia sesudah itu, walaupun diketahui pula, bahwa itu bukanlah dimaksud sebagai harga mati. Syafrudin Prawiranegara pada mulanya menolak untuk ikut mendirikan PRRI. Ketika didesak juga oleh pihak militer, ia menjawab, jika harus tetap demikian, tuan-tuanlah para perwira yang sebaiknya langsung menjadi menteri, biar kami orang sipil menjadi menteri muda saja. Masing-masing tahu, bahwa pembentukan PRRI sebenarnya akan digunakan sebagai penggertak Pusat, dan diharapkan akan dapat dijadikan sebagai alat tukar dengan sebuah Pemerintahan Hatta atau sebuah Pemerintahan Sri Sultan Jogja (semacam raulislag), sebagai alternatif penyelesaian satu-satunya, diluar perang.

Langkah pertama yang pernah ditempuh Kasad Mayjen Nasution terhadap timbulnya awal gejolak (Dewan Banteng dan Dewan Gajah) pada bulan Desember 1956, adalah dengan dikeluarkannya cepat sebuah Surat Perintah tanggal 2 Januari 1957 untuk Kol. Gatot Subroto (Wapangad), Kol.A.Yani, Let.Kol.Sjoeib, Mayjen. Alwin Nurdin, Mayor Sahala Hutabarat dan Mayor Ali Hasan (terlampir) untuk menemui Kol. Simbolon dan para Komandan Resimennya dengan tugas mengusahakan bagaimanapun, untuk menghindarkan bentrokan senjata dan pertumpahan darah.

Ternyata perintah ini sangat terlambat dan kontroversief dengan keadaan. Karena Nasution sebelum itu rupanya telah melaksanakan approach terselubung dengan para bawahan Simbolon sendiri. Dalam bentuk sugestie atau umpan kepada Let.Kol. Djamin Ginting dan Let.Kol.Wahab Makmur, masing-masing ketika itu menjabat Ka.Staf Terr dan Komandan Resimen II, untuk mengambil kedudukan Panglima. Model serupa ini, melalui perwira-perwira intel, dalam berbagai gaya, tapi menurut prinsip yang sama, tampaknya diam-diam juga diterapkan di Padang, Palembang dan Makasar, untuk memperlemah kesatuan tekad pihak-pihak yang sedang bergolak. Banyak pula perwira di Sumatera dan di Sulawesi, yang pada episode pertama ikut hadir dengan bersemangat dalam jajaran penantang, tapi karena berbagai bentuk pendekatan yang

diatur, menjadi tak hadir lagi pada episode-episode akhir dari perjuangan, apalagi disaat risiko sudah mulai menongol. Kawan-kawan ini, seperti Nurmatias, Alamsyah, Andi Jusuf dan lain-lain, secara mental dan idiciel dapat dikatakan seakan telah kehabisan stamina waktu itu. Peralihan sikap mereka menurut mereka adalah disebabkan karena hendak memegang keta'atan kepada atasan, karena hendak menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, dan demi menjauhi separatisme atau mewaspadai pengaruh partij-partij politik seperti Masyumi dan PSI. Mereka umumnya dalam perkembangan seterusnya, telah dapat memelihara karir mereka tanpa terganggu, dalam masa Orla dan seterusnya dalam masa Orba.

Gelas yang dilemparkan oleh Kol. Simbolon beserta perwira-perwiranya ke lantai, telah pecah menjadi beling, dan tak lama disusul pula oleh pecahnya ikrar bulat itu sendiri.

Usaha selanjutnya dari Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan tuntutan-tuntutan daerah sepanjang tahun 1957, adalah dengan berturut-turut mengirim sejumlah misi seperti :

- Misi Kol. Dahlan Djambek
- Misi Menteri Pertanian Eny Karim
- Misi Dr. Leimena/Sanusi
- Misi Prof. Zairin Zein/Nazir Pamuntjak
- Misi Kol. Mokoginta cs

Semua untuk Sumatera Tengah, disusul lagi dengan penunjukkan Panitia Tujuh dan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional serta Musyawarah Pembangunan. Sukarno yang hadir pada musyawarah-musyawarah tersebut pernah melepas sepatunya sambil mengamati-amatinya dalam pegangan tangannya, entah sedang berpikir mencari ide-ide, entah sedang terlalu kenyang oleh berbagai pendapat dan saran yang didengarnya.

Semua upaya tak pernah mencapai efeknya yang diharapkan, karena dirasakan sebagai kurang sungguh dan ikhlas dari pihak pusat. Presiden Sukarno dan Jend. Nasution seolah telah berkeputusan untuk tidak akan memenuhi tuntutan-tuntutan, terutama seperti yang telah dibulatkan dalam pertemuan Palembang antara semua perwira yang kritis, yang keta'atan mereka dianggap sudah sangat mendekati ambang batas.

Konsepsi Presiden dengan Nasakomnya dan Demokrasi terpimpinnya, yang telah di"ultimatumkan" di Istana dengan pintu tertutup dan

dijaga kuat oleh AD pada Februari 1957, kepada semua pimpinan masyarakat dan tokoh-tokoh partij, kelihatannya harus direalisasikan.

Untuk membersihkan jalan ke depan, Kasad Nasution pertamanya telah menjadikan Kol. Zulkifli Lubis sebagai buron, menahan perwira-perwira senior dari Ter Siliwangi, diantaranya Sukanda Bratamenggala, Sapari dan Abimanyu, menonaktifkan sejumlah alumni SSKAD dan telah menangkap Komandan RPKAD Mayor Djaelani di Batujajar, diwaktu yang terakhir ini tengah menghadiri Lustrum SSKAD. Semua mereka ini telah dengan terbuka menentang kepemimpinan TNI-AD, seiring dengan sikap komandan-komandan militer dari daerah-daerah yang sedang bergolak. Bagi Nasution, sebagai pelaksana ide politik baru Sukarno di lapangan, tampaknya tidak tersisa lagi pilihan apapun; Ahmad Husein dan Ventje harus quit dan karena kedua mereka ini secara geografis berada di luar pulau Jawa, harus dilakukan dengan suatu operasi militer, dengan pengerahan kekuatan Darat, Laut dan Udara.

Walaupun Moh. Hatta sangat gusar dengan sikap Ahmad Husein dengan memproklamasikan PRRI, ia toh memohon kepada Kasad Nasution untuk tidak mendaratkan kekuatan perang di Sumatera dan Minahasa. Menurutnya, itu bukan jalan keluarnya Kasad menolak Hatta lupa, bahwa sesudah mengundurkan diri sebagai wakil Presiden di tahun 1956, bagi Nasution ia tidak siapa-siapa lagi.

Dalam sebuah buku mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Howard Palfrey Jones, bernama : *The Possible Dream*, tertulis sepotong ucapan mengenai Jend.Nasution, oleh Hatta :

*"From the standpoint of America, you could not have a better man as chief of staff of the Indonesian Army. I do not agree with him on many things. I did not agree that the army should launch an attack on the rebels. That was a mistake. But from your standpoint, Nasution is fine"*

Hatta sebagai negawaran telah menyatakan keberatannya seperti demikian dan Nasution sebagai prajurit sejati tidak terkesima. Atau pernah suatu peperangan dilancarkan karena alasan pribadi. Mungkin saja itu pernah terdapat di abad pertengahan, di zaman masih adanya raja-raja yang despotis. Hatta adalah seorang moralis; perang dianggapnya bertentangan dengan norma-norma moral. Ia juga tak dapat menyetujui Perang Trikora dan Perang Dwikora, yaitu perang yang ditimbulkan secara sepihak oleh Sukarno sendiri.

Sesudah sekian dasawarsa berlalu, semua yang keruh menjadi bening dan semua sampah telah menjadi endapan, sanggupkah Nasution melangkah seperti yang pernah diperbuat oleh bekas Menteri Pertahanan Mc Namara yaitu; dengan mengatakan "Mea Culpa", tentang perang di Sumatera Tengah dan perang di Sulawesi Utara, yang telah berlangsung semenjak tahun 1958, selama 3 tahun lebih itu dengan akibatnya yang berlarut sekian lama dan traumatis? . Atau haruskah Ahmad Husein dan Ventje Sumual sendiri yang mestinya menjadi pihak yang harus mcrasa menyesal?

### Janji Dan Kehormatan

Sewaktu pada seminar tanggal 21 April yang lalu, ditempat ini juga, Let.Kol. Ventje Sumual (kakak kelas saya di SSKAD) selesai membacakan makalahnya, ia menambahkan lagi, khususnya dalam bahasa Belanda: "*Geen haar op mijn hoofd heeft er spijt van!*" Ucapan yang sedikit itu, pasti akan menggiring orang kepada pertanyaan, ya, dalam bahasa yang sama : "*Dat zegt veelt*".

Namun, selama kurun waktu 40 tahun lalu, semenjak Presiden Sukarno dan Kasad Mayjen A.H.Nasution, melaksanakan aksi militer mereka di Sumatera dan Sulawesi Utara, sampai kepada masa despotisme Suharto yang baru lalu selama 32 tahun, tak kunjung ada kebebasan untuk membantu menjelaskan "hoeveel"nya itu dari apa yang dimaksud Ventje, guna meluruskan opini-opini masyarakat banyak dan untuk generasi penerus. Di zaman Orla dan Orba, semua orang boleh saja mengucapkan sesuatu, selain dari mengatakan bahwa Pemerintah itu salah. Ada sebuah anekdot cantik di era totaliter Suharto : banyak orang jika akan berobat gigi, pergi ke Singapura. Ketika ditanya, mengapa kok sejauh itu, dijawab : ya, di Jakarta tak bisa buka mulut. Di masa sesudah PRRI menyerah kalah, menyusul bersambung tragedi yang menyedihkan. Apa yang dinamakan amnesti, abolisi dan rehabilitas yang dijanjikan Sukarno dan Nasution, dianggap seperti tak pernah ada. Yah, orang sudah kalah mau apa lagi.

Ada dua skenario yang berbeda jauh, ketika pihak pusat menerima laporan menyerah dari pihak pemberontak PRRI pada bulan Juni 1961 di Sumatera Barat. Jen.Suprpto, Deputy Wilayah Sumatera, jauh dari rasa berbangga sebagai pihak yang menang perang, berucapan: "Kita lupakan

yang sudah lewat, mari kita bersama-sama lagi pembangunan negara ini : jalan masih jauh !”.

Beberapa waktu kemudian, dalam rangka menginspeksi di Sumatera Barat yang sudah ditaklukan, Jen.Nasution tiba pula di Padang. Ia berpakaian lapangan, berdiri tegap di atas jeep terbuka di samping sopir, berkeliling di kota Padang, sambil membalas sekali-kali penghormatan dari masyarakat yang berdiri di pinggir jalan. Penampilannya memang seperti seorang komandan militer yang menang perang, berbeda banyak dari Deyah Suprpto. Kata-kata akhir dari ia ini Suprpto, “Jalan masih jauh; teringat kembali, ketika terberita, bahwa ia telah terbunuh di Lobang Buaya.

Janji amnesti, abolisi dan rehabilitasi terhadap PRRI, mungkin saja dipakai oleh Nasution sebagai siasat atau daya tarik untuk menyerah. Mereka sesudah kembali boleh dikatakan dijauhi, disulitkan dan disengsarakan. Timbul pertanyaan yang tak habis-habisnya mengenai pribadi Nasution sebagai seorang perwira tinggi dengan sebuah janji.

Ada beberapa yang patut juga disebut-sebut secara sepintas. Bekas tokoh PRRI Syafrudin Prawiranegara, mantan Ketua PDRI, yang pernah memimpin Republik Indonesia ini di masa tersulitnya, terpaksa permohonan kepada Presiden Sukarno, untuk diizinkan saja bermukim di luar negeri, karena tak kerasan lagi hidup selama pengasingan di daerah Jawa Timur; Sukarno menolak. Ada saran, supaya ia minta ma'af terlebih dahulu kepada Sukarno atau Nasution, tetapi Syafrudin yang selalu jujur itu, kontan menepis seraya menjawab : “Saya tak pernah merasa bersalah!”.

Sebelum menyerah, Kol. Maludin Simbolon mengutus seorang kurir untuk menyampaikan sepucuk surat terlebih dahulu kepada Jen.Nasution. Senang sekali bekas panglima Bukit Barisan itu, mendengar reaksi positif dari Nasution : “Sudah lama saya tunggu-tunggu ini.” Sewaktu Simbolon, beberapa waktu sesudah itu menghadap Nasution, Jendral ini, lulusan Sekolah Raja di Bukittinggi dan Akademi Militer Darurat Belanda di Bandung, hanya berkata : “Bersiaplah untuk berangkat ke tempat internering Kolonel di Batu, Malang. Disana juga ada kawan, Moh. Natsir.” Kolonel senior Simbolon, yang perasaannya tentu agak tergoncang saat itu, ternyata sanggup menguasai diri. Ia baru agak lepas kembali, ketika ia suatu waktu akan diangkut dengan sebuah mobil orang tahanan yang tertutup, dari lapangan terbang ke penjara

RTM. Ia menolak dengan gigih seraya sedikit mencak-mencak. "Ya, Tuhan, "karena : "Saya bukan penjahat !" Sulit untuk tidak percaya, bahwa Nasution membiarkan perlakuan-perlakuan yang agak kurang indah terhadap bekas PRRI itu, bahkan sesama perwira lagi.

Kolonel Lubis, buronan pertama dari Kasad Nasution, pencium awal dari rencana peneterapan Nasakom yang sekalian melibatkan AD itu, disekap dalam sebuah kamar tahanan di bawah tanah.

Kolonel Dahlan Djambek, bekas Ketua Gerbak (Gerakan Bersama Anti Komunis) di Sumatera Tengah, adalah yang paling terbebas dari segala kepedihan yang harus diterima orang yang kalah. Ia telah disambut langsung dengan peluru, sewaktu ia melangkah hendak masuk kota guna menyerahkan diri. Pasukan Diponegoro, yang ditugaskan Nasution untuk memburu dan menangkap Ahmad Husein selama bertahun dan yang sangat berat disusupi unsur komunis, sering terlalu cepat menembak dan pula terlalu banyak, hingga memerlukan kuburan-kuburan masal juga. Rombongan Syafrudin, Natsir, Assa'at dan Burhanudin Harahap yang akan menyerah, terpaksa segera menjauhi daerah-daerah operasi pasukan ini, menembus hutan menuju Tapanuli, dimana kebetulan tentaranya agak bersahabat.

Bekas Perdana Menteri pertama, Sutan Syahrir, tidak kemana-mana selama meletusnya perang PRRI, namun akhirnya dapat giliran juga, seperti Anak Gede Agung, Moh. Roem dan Prawoto, untuk digiring ke balik kerangkeng. Ia kemudian meninggal sewaktu diizinkan berobat ke Swiss, tetapi tetap pada status tahanan. Mantan penghuni barak internering bersama Moh. Hatta itu, di tengah hutan Tanah Merah di Irian, pasti tak menduga sebelumnya, bahwa bila Indonesia sudah merdeka nantinya, ia akan juga dicekal lagi. Namun ternyata, bekas perunding linggarjati itu, berakhir hidup di pencekalan itu sendiri.

Menantang komunisme dan menantang demokrasi terpimpin atau tirani lainnya memang banyak dan sarat risikonya. Meminta banyak korban, namun belum tentu pula selalu langsung berhasil. Ventje Sumual tak pernah menyesal karena itu dan pasti Ahmad Husein tentunya juga.

Di Arlington, dekat Washington, tempat berkumpulnya para pahlawan Amerika yang telah tiada, terdapat juga patung seorang bekas pemberontak, Jend. Robert Lee, yang telah menantang Presiden Lincoln dalam perang saudara tahun 1860'an. Saya tak berani memastikan, apakah bakal berdiri pula patung Ahmad Husein dan Ventje Sumual di

Kalibata pada suatu waktu nanti, atau patung Syafrudin dan Natsir di silang Monas, menemani patung Diponegoro yang sudah menunggu juga disana.

Pada tiga tahun yang lewat, persisnya tahun 1995, Robert Mc Namara, bekas Menteri Pertahanan dibawah Kennedy, menulis sebuah buku mengenai Vietnam. Bermalam-malam ia dan hari tuanya tak dapat tidur, karena diusik oleh langkah-langkah perang yang tidak adil, yang pernah dilakukannya terhadap rakyat Ho Chin Minh. "We were wrong in Vietnam," katanya dalam buku itu : "Terribly wrong".

Akankah Nasution dapat mengatakan yang serupa mengenai perang yang mulai disulutnya di tahun 1958 di Sumatera Utara itu, yaitu : "We were wrong in Sumatera and in North Sulawesi, terribly wrong". Sambil mengatakan, biarpun pelan atau dalam hati, "Mea Culpa". Dan dengan itu, akan terasa bahwa sang reformasi telah dihadirkan pula dalam bidang pembenahan sejarah.

### Suatu Fragmen Dari Sebuah Surat Moh. Natsir

Dalam sepucuk surat pribadi yang di tik sendiri oleh Mantan Perdana Menteri Moh. Natsir tanggal 19 September 1960 di Daerah Sumatera Barat, di tengah perang PRRI, yang dialamatkanannya kepada Kol. Dahlan Djambek, Letkol. Ahmad Husein, Letkol Sjoeib dan Mayor Nusyirwan, yang di Jakarta sebelum minggat ke Sumatera sering berkonsultasi dengannya seperti juga dengan St. Syahrir, Prof. Djokosutono dan Jen. T.B. Simatupang, terdapat sebuah fragmen yang pantas dibaca dan diketahui pula, dalam rangka pembenahan sejarah. Diantaranya mungkin akan sedikit menjadi jelas, mengapa Kol. Zulkifli Lubis dinyatakan buron. Inilah bahagian yang dimaksud, yang terdapat dalam surat khusus tersebut :

..... Diwaktu itu saudara Prawoto dan saya dikunjungi oleh Kol. Gatot Subroto, katanya sebagai pribadi, akan tetapi belakangan terbukti sebagai utusan dari Nasution, Kol. Subroto menyatakan kepada kami dengan tegas bahwa pimpinan Angkatan Darat sudah sampai kepada kesimpulan bahwa kaum politisi sudah gagal dalam tugasnya memelihara negara. Oleh karena itu supaya kami jangan kaget apabila kaum militer akan mengambil over kekuasaan. Katanya, kaum militer sekarang sedang

siap-siap. Dia mau menyampaikan hal ini kepada kami berdua, katanya oleh karena mereka percaya kepada kami.

Jawab kami ialah, terima kasih atas kepercayaan yang telah dilimpahkannya kepada kami, dan supaya dia beserta kawan-kawannya tidak usah khawatir, bahwa kami akan mensalah-gunakan kepercayaan itu. Selanjutnya kami berkata, kalau memang pihak militer sudah menganggap politisi gagal sama sekali, dan sudah ada rencana, silahkan. Kol. Gatot Subroto tidak puas dengan jawaban yang demikian dan bertanya akan bagaimana sikap Masyumi ?

Kami jawab, Masyumi adalah golongan orang-orang yang tidak bersenjata dan tentu mereka tidak akan banyak dapat berbuat apa-apa. Kami lalu memberikan sumbangan pikiran-pikiran kami dengan mengemukakan apa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah yang terdiri dari politisi selama ini yang menurut kesimpulan pihak militer sudah gagal dalam tugasnya itu, yaitu persoalan-persoalan yang akan diwarisi oleh pemerintahan militer yang dimaksud oleh Kol. Gatot Subroto. Setelah larut malam (kira-kira pukul 2.00), Gatot Subroto menyatakan maksudnya ialah supaya walaupun pihak militer yang akan memegang kekuasaan dan menjalankan pemerintahan sebagai junta-militer, tapi mereka juga akan memberi kesempatan kepada politisi yang mereka pilih untuk turut serta.

Dia membayangkan bahwa dari politisi yang dimaksud itu adalah antara lain kami berdua. Pembicaraan itu saya akhiri dengan mengatakan kepada Kol. Gatot Subroto kalau saudara sudah sampai kepada kesimpulan, bahwa politisi itu ada berbagai macam ragamnya maka saya ingin menyatakan bahwa segolongan politisi yang lebih suka melihat mata bayonet datang dari depan, daripada merasakan ujung bayonet dipunggung yang menentukan kemana harus berjalan untuk keselamatan kedudukannya. Lalu saya katakan bahwa kami berdua beserta beberapa kawan kami yang lain kebetulan termasuk kepada golongan politisi yang seperti itu. Dengan itu pembicaraan kami berakhir.

### **R.P.I Dan *Seventh Fleet***

Ada dua hal di sekitar perang PRRI, yang agak tercecet, karena jarang disinggung secara luas; ialah soal lahirnya Republik Persatuan Indonesia (RPI) dan soal sebuah rencana menyangkut *Seventh Fleet*. Pada

akhir tahun 1959, sewaktu operasi-operasi dari pasukan-pasukan Diponegoro lagi intensifnya di seluruh Sumatera Barat, bahkan sering dengan mengerahkan pesawat-pesawat pemburu Mustang yang sangat menakutkan itu, pihak militer dan pihak tokoh-tokoh sipil berkumpul selama lebih kurang sebulan, bertempat di sebuah dusun bernama Pagadis, di sebelah Utara kota Payakumbuh. Yang hadir adalah Kol. Dahlan Djambek, Kol. Z. Lubis, Kol. M. Simbolon, Letkol Ahmad Husein, Letkol Sjoeb, Mayor Nusyirwan, Mayor Boyke Nainggolan, Syafrudin Prawiranegara, Moh. Natsir, Mr. Assa'at, Burhanudin Harahap dan Sulaeman. Tujuannya adalah untuk membicarakan situasi yang makin bertambah buruk tentang soal bernegara dan soal berbangsa serta langkah-langkah yang sebaiknya dan seharusnya mesti diambil di masa depan. Bagaimana supaya rakyat di kemudian hari tidak lagi terpaksa menantang suatu kekuasaan, karena terlibat dalam, dengan tirani dan nafsu angkara murka, seperti yang tengah diperlihatkan Presiden Sukarno dan pimpinan perang Nasution. Hubungan untuk itu telah diadakan dengan para pemberontak Daud Beureuh, Karto Suwiry, Kahar Muzakar, Ibnu Hajar dan tokoh-tokoh tertentu dari Indonesia Timur. Sebelum pertemuan dibuka, Syafrudin menangis lama, hingga harus ditunggu.

Lahirilah sebuah draft konstitusi yang pokok-pokok pertamanya di kedepankan oleh Syafrudin dan Assa'at. Dari perwakilan PRRI di Eropa, Mr. St. Moh. Rasjid, juga diterima sebuah rencana UUD yang telah disusunnya dengan bantuan sejumlah pakar asing. Ciri-ciri khas dari konsep konstitusi itu adalah berkurangnya kekuasaan eksekutif (*distribution of power*) dan banyak pasal tentang hak azasi manusia. Kemudian disepakati pula dua hal yang cukup menarik perhatian, yaitu negara yang dimaksud akan berdasarkan federasi (terdiri dari negara-negara bagian dan daerah-daerah swatentra) dan tidak berdasarkan Islam seperti yang pernah diduga. Negara yang bernama Republik Persatuan Indonesia dan hanya berazaskan keimanan kepada yang Tuhan Yang Maha Esa. Negara baru ini diproklamasikan oleh Syafrudin Prawiranegara, yang oleh semua yang hadir telah dipilih sebagai Presiden pada tanggal 8 Februari 1960 di Bonjol.

Tetapi, beberapa bulan kemudian pihak militer memisah dari negara baru ini dibawah pimpinan Ahmad Husein, dan membentuk suatu Komando Tunggul. Pihak politisi memang merasa agak kaget, hingga dengan sendirinya terpaksa menduga-duga hendak kemana dan akan

berapa jauh gerangan tujuan dari pembentukan komando tersebut sesudah mengambil jarak itu. Sementara itu, pasukan Ahmad Husein memang makin terdesak dan bantuan apapun memang tak lancar diperoleh.

Mohamad Natsir mengirim sepucuk surat yang panjang yang ditujukan khusus kepada Dahlan Djambek, Ahmad Husein sendiri, Sjocib dan Nusyirwan, yaitu perwira-perwira yang cukup dikenalnya dan telah sering berkonsultasi bila di Jakarta dengan tokoh-tokoh seperti St. Sjahrir, Prof. Djokosutono dan Jend. T.B. Simatupang termasuk dengan dia sendiri sebagai Ketua Masyumi.

Katanya, jika dirasakan keadaan sudah demikian sulit dan gawat dan resiko perjuangan sudah menjadi memuncak, marilah itu kita terima dan hadapi bersama-sama; ia tidak akan menghindari atau meminta suatu pengecualian apapun dan anggaplah dirinya bukan Ketua Partij Masyumi.

Memang saat itu di lapangan, pasukan-pasukan Diponegoro sedang melaksanakan kampanye yang keras dan ketat. Kampung-kampung di sekitar pangkalan-pangkalan gerilya dibakar, panen-panen di sawah dan di ladang sengaja dirusak dan dihanguskan serta pasar-pasar rakyat yang mendistribusi bahan-bahan pokok hidup diblokir rapat, agar tidak ada yang dibawa keluar.

Pada bulan Juni 1961 semua kekuatan Ahmad Husein menyerah kepada Jend. Suprpto, Deputi Wilayah Sumatera dan kemudian pada bulan Agustus berikutnya, Syafrudin Prawira negara sendiri, Presiden RPI, mengeluarkan pula instruksi untuk menghentikan seluruh tindakan perlawanan dan permusuhan.

Sewaktu kami mengadakan pembicaraan yang mendalam dengan Foster Collins dari CIA, yang nampaknya membawahi urusan-urusan Asia dan Pasifik, mengenai bantuan senjata untuk Sumatera Tengah, dikemukakan, bahwa tujuan utama kami memperkuat diri, adalah terutama untuk mencegah, jangan sampai pihak Pusat bermaksud untuk mengerahkan kekuatan senjatanya sebagai jalan keluar dari penyelesaian. Pihak asing yang membantu telah mengadakan 5 kali

"Air-dropping" di Sumatera Tengah ditambah dengan satu kali "sea-delivery" dalam bentuk *rendesvous* di Samudera Hindia dengan sebuah SLT Jumbo, kira-kira arah Selatan dari Siberut. Kami menerima beberapa jenis senjata yang sebelumnya tak dipunyai oleh AD, seperti bazooka, recoilles-gun dan point-fifty untuk anti-aircraft. Termasuk juga dititipkan

kepada kami sebuah Tim Penasehat Militer yang sangat ahli, tetapi yang nantinya, sesudah kota Padang dan Bukittinggi jatuh, terpaksa diberangkatkan pulang lagi dengan sebuah submarine yang mendekati di Pesisir Selatan di sebelah kota Painan.

Sebuah rencana operasi khusus yang juga pernah dibicarakan, tapi tak banyak diketahui orang, ternyata tak kunjung sampai terealisasi. Mengingat tentara Ahmad Husein tak cukup kuat, walaupun juga sejumlah pelajar dan mahasiswa sudah terlatih dan dipersenjatai, kekuatan Nasution dengan tenaga AD, AL dan AU-nya pasti akan selalu tetap unggul, satu kali mereka mendarat. Kami mengusulkan jika mungkin supaya pasukan Amerika, langsung saja terlebih dahulu hadir di Sumatera Barat. Mereka menggelengkan kepala dan terdiam. Ucap mereka kemudian. Menurut konstitusi kami, angkatan Perang Amerika hanya akan hadir di mana saja, bila warga mereka atau property mereka berada dalam keadaan sangat terancam. Pembicaraan berakhir, sesudah dikatakan mereka, terserah tuan-tuan.

Diam-diam dan secara ketat sekali, telah disusun sebuah rencana rahasia untuk membakar kilang minyak di Caltex dan menyandera semua personil bangsa Amerika yang ada. Nasib rencana ini ternyata tak berbeda dengan nasib rencana Kol. Lubis yang pernah berusaha untuk menculik Presiden Soekarno dan Kasad Nasution pada akhir tahun 1956 dengan melibatkan RPKAD di bawah Mayor Djaelani, yang kemudian nyatanya hanya bergerak hingga Kerinci saja. Semua berakhir dengan kegagalan, disebabkan kurang rapi dan telitinya semua detail perencanaan dan karena lemahnya para pelaku yang ditunjuk.

Sewaktu Armada Ketujuh sudah mendekati ke Perairan Riau, kami menerima sebuah berita singkat yang terselubung dalam satu "unbreakable code", berbunyi : Kami sudah berada di perairan Riau, terserah tuan-tuan !.

Beberapa waktu kemudian, karena tak terlihat isyarat-isyarat yang konkrit dari pihak kita dan dikejar pula oleh perkembangan-perkembangan yang cepat. Armada raksasa itu menghilang kembali, dan mungkin sudah terapung-apung lagi di Guam atau Subic Bay, menunggu tugas yang lain pula.